



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
UNIT KERJA : RSUD KABUPATEN BULELENG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : PUTU ARYA NUGRAHA
2. Jabatan : DIREKTUR
3. NHK : 795447

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 7.360.000.000

1. Tanah Seluas 394 m2 di BULELENG, HASIL SENDIRI Rp. 62.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/120 m2 di BULELENG, HASIL SENDIRI Rp. 275.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 257 m2/250 m2 di BULELENG, HASIL SENDIRI Rp. 1.350.000.000
4. Tanah Seluas 180 m2 di BULELENG, HASIL SENDIRI Rp. 270.000.000
5. Tanah Seluas 140 m2 di BULELENG, HASIL SENDIRI Rp. 118.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 450 m2/300 m2 di BULELENG, HASIL SENDIRI Rp. 3.105.000.000
7. Tanah Seluas 420 m2 di BULELENG, HASIL SENDIRI Rp. 880.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 400 m2/200 m2 di BULELENG, HASIL SENDIRI Rp. 1.300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 660.924.000

1. MOTOR, YAMAHA STL MIO Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 1.290.000
2. MOTOR, HONDA NC110 D CW AT (VARIO) Tahun 2008, WARISAN Rp. 2.950.000
3. MOBIL, HONDA HONDA BR-V DG3 1.5L PRE CVT Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 274.266.000



4. MOTOR, HONDA F1C02N46L0 A/T SPD MOTOR SOLO - 004
Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 18.873.000
5. MOBIL, MAZDA MAZDA CX-31.5(4X2) A/T Tahun 2022, HASIL
SENDIRI Rp. 363.545.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	216.202.598
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	2.447.090.067
F. HARTA LAINNYA	Rp.	18.365.632
Sub Total	Rp.	10.702.582.297
III. HUTANG	Rp.	2.874.149.459
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	7.828.432.838

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.